



Analisis Anggaran Biaya Operasional Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020

Hernadah Nelly^{1*}, Yuli Ardiany¹

¹Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: hernadah-nelly@gmail.com

Artikel Info

Diterima :17-05-2023

Direvisi : 19-06-2023

Diterbitkan: 10-07-2023

Kata Kunci:

Anggaran, Biaya Operasional, PUPR

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kualitatif dan kuantitatif melalui dokumentasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan meminta langsung kepada bagian bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov Sumbar. Dari hasil penelitian biaya operasional Pada tahun 2018 dengan jumlah total anggaran biaya operasional sebesar Rp.417.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.368.400.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.48.600.000. pada tahun 2019 dengan jumlah total anggaran sebesar Rp.515.600.000 dengan tingkat realisasi Rp.489.223.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.26.377.000. sementara pada tahun 2020 dengan jumlah total anggaran biaya operasional sebesar Rp.588.300.000 dengan tingkat realisasinya sebesar Rp.562.100.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.26.200.000. Dari total realisasi anggaran biaya operasional dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasinya pada tahun 2018 merupakan tingkat realisasi rendah dari pada tahun anggaran 2019 dan 2020.

PENDAHULUAN

Setelah dikeluarkan undang-undang otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat melaksanakan kegiatan atau program pemerintahannya secara mandiri tanpa harus terus menerus bergantung pada negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur urusan Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom dalam mengurus serta mengatur urusannya sendiri yang berkaitan dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat didalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Provinsi Sumatera barat sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang ada dengan baik, serta berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dari beberapa infrastruktur yang ada di kota Padang, pembangunan jalan dan jembatan merupakan hal yang paling besar pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat, mengingat kota Padang merupakan jalur lintas Sumatera. Infrastruktur jalan dan jembatan di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi di kota Padang.



Demi mewujudkan hal itu, maka pemerintah pusat mengalokasikan dana agar dapat melancarkan proses pembangunan jalan dan jembatan. Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program “agar penggunaan dana sesuai dengan pembangunannya. Maka diperlukan pengelolaan yang baik agar nantinya dana yang dianggarkan bisa efektif dalam penggunaannya.

Jadi, guna mengetahui kinerja dari pemerintah daerah atau Pemda maka diperlukan pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dengan mengukur kinerja Pemda tersebut. Pengukuran kinerja yang menjadi acuan yaitu kinerja dari laporan keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut dapat melihat penyerapan anggaran.

Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan, dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (Novita, 2014). Anggaran dilaksanakan pada periode satu tahun kedepan yang tentunya mengacu kepada anggaran dan realisasi yang dicapai pada tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai tolak ukur pembuatan anggaran berikutnya.

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kerja. Sedangkan Sasongko & Parulian (2015: 2) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Tujuan adanya anggaran sektor publik yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Halim & Kusufi, 2014).

Anggaran dalam merencanakan target yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan sebagai tolak ukur alokasi dana perusahaan yang disetujui pimpinan untuk dibelanjakan. Pada anggaran yang sudah digunakan maka akan dicatat dalam laporan realisasi. Laporan realisasi anggaran merupakan sebuah data keuangan yang lebih dahulu dihasilkan sebelum kemudian dijadikan bahan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan (Aprilawati & Yuliyanto, 2020).

Menurut Puranta & Yunita (2010:10), banyak sekali ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tujuan adanya laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka untuk memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan.

Penyusunan anggaran juga harus dievaluasi sehingga tidak terjadi kesalahan atau kejadian yang dapat merugikan perusahaan tersebut pada nantinya (Gusman & Purbadini, 2016). Secara teori dijelaskan bahwa elemen yang berpengaruh terhadap besarnya laba yang diperoleh perusahaan adalah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas operasional perusahaan (Sorongan et al., 2018).

Biaya sangat di butuhkan dalam kegiatan operasional, hal ini untuk menghindari timbulnya biaya yang tidak diperlukan yang akan menyebabkan pengeluaran menjadi besar. Besarnya biaya akan menyebabkan pengeluaran yang besar dan kondisi ini sangat merugikan instansi. Biaya adalah keseluruhan pengorbanan ekonomis yang di keluarkan untuk

memperoleh atau menghasilkan barang dan jasa. Suatu perusahaan atau instansi dalam menjalankan operasinya terlebih dahulu menyusun suatu rencana biaya agar tujuan dapat tercapai dan dapat membantu manajemen dalam mengambil jalannya perusahaan ataupun instansi. Untuk mendapatkan biaya operasional yang baik, dibutuhkan kerjasama antar bidang-bidang fungsional yang ada dalam instansi (Akbar, 2016).

Biaya operasional merupakan biaya yang terkait dengan menjalankan dan mengelola bisnis. Dalam biaya operasional terdapat biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dari instansi tersebut. Biaya operasional ini juga digunakan untuk menunjang suatu kegiatan dalam instansi. Biaya operasional dalam setiap kegiatan biasanya digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di dalam kegiatan yang telah ada diperlukan adanya perencanaan dan pengendalian dalam hal biaya operasional. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat mengakibatkan kerugian. Selain itu dibutuhkan adanya pengawasan dalam biaya operasional yang akan dikeluarkan dalam suatu kegiatan (Rais & Setiawan, 2018).

Tujuan utama pokok dari penyusunan biaya operasional adalah memperbaiki rencana strategi dan pemanfaatan organisasi, mengkoordinasikan berbagai aktifitas sebagai bagian organisasi, yang menyerahkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, memberikan otorisasi besarnya biaya yang boleh dikeluarkan dan memberikan umpan balik terhadap pemerintah daerah terhadap kinerja mereka dan sebagai perjanjian atau komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi dasar kinerja pemerintah daerah yang terkait. Biaya operasional merupakan komponen biaya perusahaan diluar biaya produksi. Biaya operasi ini merupakan biaya yang memasarkan produk perusahaan hingga sampai ke tangan konsumen beserta keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan proses administratif yang dilakukan perusahaan (Nurfaidah, 2017).

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang Analisis Anggaran Operasional Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Pada PT. Bank SULSELBAR. Yuswari (2018) setelah dilakukan analisis varians diketahui pada tahun 2012 sampai 2016 terjadi beberapa beban yang melebihi anggarannya. Beban-bekan tersebut adalah beban penyisihan kerugian, beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi. Selain beban yang dikeluarkan melebihi anggaran, pendapatan pada tahun 2012- 2016 untuk pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non operasional lainnya mengalami penurunan sehingga selisihnya bersifat unfavorable atau tidak menguntungkan. Selain itu penelitian yang sama sejalan dengan Rizki & Chartady (2018) tentang Analisis Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Tanjung Untung Tanjungpinang yang mengatakan bahwa hasil perhitungan menggunakan analisis selisih varians anggaran biaya operasional yang terjadi yaitu selisih yang tidak menguntungkan (*unfavourable*) antara anggaran dan realisasi anggaran yang terjadi lebih besar dari anggaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Dengan demikian menunjukkan PT. Tanjung Untung Tanjungpinang tidak memiliki kinerja yang baik, yang mana seluruh bagian yang ada dalam perusahaan tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran.

Jadi, pengolahan anggaran operasional disuatu dinas PUPR menjadi sangat penting, Sebab membantu instansi dalam mewujudkan kegiatan perusahaan sebagai pertanggungjawaban sehingga penyimpangan dapat diminimalisir. Instansi yang telah membuat anggaran tetapi tidak dilakukan evaluasi maka anggaran tersebut juga akan sia-sia. Alasan penulis memilih Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah untuk membandingkan anggaran dan realisasi biaya operasional. Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, oleh karena itu penulis memilih judul "Analisis Anggaran Biaya Operasional Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020"

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran

Istilah anggaran cukup sering didengarkan dalam keseharian kehidupan bermasyarakat. Mulai dari anggaran belanja rumah tangga, anggaran pembangunan rumah ibadah, anggaran perbaikan jalan, sampai dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam skala nasional. Dari beberapa istilah ini, secara sederhana istilah anggaran dapat dirumuskan sebagai rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu hal di masa depan. Dari kacamata pemerintahan, anggaran merupakan perwujudan dari kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam wujud program yang akan dilaksanakan disertai dengan biaya yang diperlukan/disediakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut (Akbar, 2016).

Julita, (2016) mengatakan anggaran sebagai sebuah rencana disusun dengan sistematis yang mencakup seluruh aktivitas organisasi direpresentasikan dalam unit moneter yang berlaku kedepan. Nafarin, (2013) menyatakan anggaran adalah rencana tertulis tentang aktivitas perusahaan atau organisasi yang dinyatakan dengan satuan uang, namun demikian dapat juga diungkapkan dalam bentuk barang atau jasa.

Biaya Operasional

Menurut Sudarsono & Edilius (2011: 201) menyatakan bahwa biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk biaya operasional usaha suatu perusahaan. Biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan aktifitas sehari-hari. Menurut Ardiyos (2009) menyatakan bahwa Biaya Operasional adalah suatu beban yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan. Biasanya mengacu pada beban penjualan dan beban administrasi dan umum dan tidak termasuk perhitungan harga pokok penjualan (*cost of good sold*).

Biaya operasional yang dikemukakan oleh Rudianto (2009) adalah biaya yang berkaitan dengan operasi perusahaan di luar biaya produksi. Sedangkan menurut Jusuf (2008) adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasi sering disebut juga sebagai operational cost atau biaya usaha.

Dari pengertian diatas maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam biaya adalah: (a) Biaya merupakan pengorbanan ekonomis. (b) Dapat diukur dalam satuan unit moneter. (c) Sifatnya yang telah terjadi maupun yang potensial akan terjadi. Istilah biaya operasional sering pula disebut dengan biaya komersil, kadang-kadang disebut dengan biaya usaha.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (Library Research) yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai buku literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data kepustakaan selain jurnal dan buku yang digunakan yaitu laporan anggaran biaya operasional di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data lapangan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, diperlukan data-data yang berasal dari sumber terpercaya dan dapat berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Maka penulis melakukan beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Sugiyono (2017: 317). Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dengan observasi dan melakukan dengan wawancara langsung kepada pegawai mengenai Biaya operasional pada dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR)

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Sugiyono (2018:276). Data yang diperoleh dari PUPR berupa laporan realisasi, foto bukti biaya operasional.

Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Sugiyono (2016: 23) data kualitatif yang diperoleh untuk tugas akhir ini berupa informasi langsung yang didapat melalui wawancara dengan pegawai PUPR yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu jenis data yang berbentuk angka. Sugiyono (2016: 23). Data kuantitatif yang didapat pada tugas akhir ini berupa perhitungan biaya operasional dan target realisasi dari tahun 2018-2020.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi atas 2 macam, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Sugiyono (2018:213), data primer yang didapat melalui wawancara dengan pegawai di PUPR

2. Data Sekunder

Merupakan Data yang sudah jadi yang diperoleh dari objek penelitian berupa laporan tulis yang dibuat secara berskala. Data sekunder dari penelitian ini yaitu data anggaran biaya operasional Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2015: 29) metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang merumuskan dan menafsirkan data serta keterangan yang diperoleh dengan cara melakukan pengumpulan, penyusunan lalu digolongkan atau dibuat klasifikasinya kemudian dianalisis dan diinterpretasikan secara objektif dengan tujuan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dari masalah yang dihadapi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biaya Operasional Dinas Pekerja Umum Dan Penataan Ruang Sumatra Barat

Menurut Jusuf (2008) adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. Secara umum, biaya operasional diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasi sering disebut

juga sebagai *operational cost* atau biaya usaha. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Tamansiswa No.1A, Alai Parak Kopi, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan anggaran biaya operasional terdapat beberapa anggaran yang dipakai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. Perbandingan Anggaran Operasional dan Realisasi Anggaran Periode 2018

No	Keterangan	2018			
		Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa
1	Perjalanan dinas	220.000.000	190.000.000	86,36	30.000.000
2	Pemeliharaan gedung	5.000.000	4.800.000	96,00	200.000
3	Pemeliharaan kendaraan	14.000.000	12.200.000	87,14	1.800.000
4	Penyusutan gedung	70.000.000	64.000.000	91,42	6.000.000
5	Penyusutan kendaraan	40.500.000	37.000.000	91,31	3.500.000
6	Penyusutan investasi	12.500.000	9.000.000	72,00	3.500.000
7	Alat alat kantor	21.000.000	19.900.000	94,70	1.100.000
8	Rekening listrik	16.000.000	15.300.000	95,60	700.000
9	Rekening telephone	5.000.000	4.700.000	94,00	300.000
10	Rekening air	8.000.000	7.500.000	93,75	500.000
11	Keamanan dan kebersihan	5.000.000	4.000.000	8,00	1.000.000
Jumlah		417.000.000	368.400.000	88,34	48.600.000

Sumber: Data Diolah 2021

$$\text{Persentasi} = \frac{\text{realisasi}}{\text{anggaran}} \times 100$$

$$\text{Sisa: } \text{Anggaran} - \text{Realisasi}$$

Berdasarkan tabel 1 diatas realisasi anggaran operasional pada tahun 2018 merupakan tingkat realisasi paling rendah yang terjadi pada PUPR tahun 2018, menunjukkan bahwa penyusunan anggaran kurang serius dalam menentukan anggaran.

Tabel 2. Perbandingan Anggaran Operasional dan Realisasi Anggaran Periode 2019

No	Keterangan	2019			
		Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa
1	Perjalanan dinas	300.000.000	285.000.000	95,00	15.000.000
2	Pemeliharaan gedung	9.000.000	9.000.000	100,00	-
3	Pemeliharaan kendaraan	15.000.000	14.400.000	96,00	600.000
4	Penyusutan gedung	72.000.000	68.000.000	94,44	4.000.000
5	Penyusutan kendaraan	42.000.000	40.100.000	95,47	1.900.000
6	Penyusutan investasi	15.000.000	13.237.000	88,24	1.763.000
7	Alat alat kantor	24.500.000	24.110.000	98,40	390.000
8	Rekening listrik	16.100.000	15.500.000	96,27	600.000
9	Rekening telephone	6.000.000	5.876.000	97,93	124.000
10	Rekening air	9.000.000	8.700.000	96,66	300.000
11	Keamanan dan kebersihan	7.000.000	5.300.000	75,71	1.700.000
Jumlah		515.600.000	489.223.000	94,88	26.377.000

Sumber: Data Diolah 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas realisasi anggaran operasional pada PUPR mengalami peningkatan dari tahun 2018 dari peningkatan realisasinya pada tahun 2019 menunjukkan bahwa penyusunan anggaran benar-benar serius dalam menentukan anggaran yang efektif.

Tabel 3. Perbandingan Anggaran Operasional dan Realisasi Anggaran Periode 2020

No	Keterangan	2020			
		Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa
1	Perjalanan dinas	330.000.000	321.000.000	97,27	9.000.000
2	Pemeliharaan gedung	10.000.000	10.000.000	100,00	-
3	Pemeliharaan kendaraan	18.300.000	17.100.000	93,44	1.200.000
4	Penyusutan gedung	80.000.000	74.800.000	93,5	5.200.000
5	Penyusutan kendaraan	60.000.000	53.000.000	88,33	7.000.000
6	Penyusutan investasi	20.000.000	19.300.000	96,5	700.000
7	Alat alat kantor	28.000.000	27.800.000	99,28	200.000
8	Rekening listrik	16.500.000	16.100.000	97,57	400.000
9	Rekening telephone	8.000.000	7.900.000	98,75	100.000
10	Rekening air	9.500.000	8.900.000	93,68	600.000
11	Keamanan dan kebersihan	8.000.000	6.200.000	77,5	1.800.000
Jumlah		588.300.000	562.100.000	95,54	26.200.000

Sumber: Data Diolah 2021

Berdasarkan tabel 3. realisasi anggaran operasional pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2018 dan 2019, sehingga anggaran realisasi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penyusunan anggaran benar-benar serius dalam menentukan anggaran yang efektif.

Perbandingan Anggaran Operasional Dan Realisasi Anggaran Pada Tahun 2018-2020

Tabel 4. Total Realisasi Anggaran Biaya Operasional Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa
1	2018	417.000.000	368.400.000	88,34	48.600.000
2	2019	515.600.000	489.223.000	94,88	26.377.000
3	2020	588.300.000	562.100.000	95,54	26.200.000

Berdasarkan tabel 4 diatas memaparkan tentang total realisasi anggaran biaya operasional secara keseluruhan mulai tahun anggaran 2018, 2019, dan 2020 pada dinas PUPR Sumbar.

Pada tahun 2018 dengan jumlah total anggaran biaya operasional sebesar Rp.417.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.368.400.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.48.600.000. pada tahun 2019 dengan jumlah total anggaran sebesar Rp.515.600.000 dengan tingkat realisasi Rp.489.223.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.26.377.000. sementara pada tahun 2020 dengan jumlah total anggaran biaya operasional sebesar Rp.588.300.000 dengan tingkat realisasinya sebesar Rp.562.100.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.26.200.000.

Dari total realisasi anggaran biaya operasional dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasinya pada tahun 2018 merupakan tingkat realisasi rendah dari pada tahun anggaran 2019 dan 2020.

Analisis Anggaran Dan Realisasi Biaya Operasional

a. Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas tingkat realisasi anggaran untuk kegiatan ini stabil, karena tidak adanya penurunan pada tingkat realisasi. Pada tahun 2018 tingkat realisasinya mencapai 86,36% dengan jumlah anggaran sebesar 120.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasinya mencapai 95,00% dengan jumlah anggarannya sebesar 300.000.000 sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasi anggarannya mencapai 97,27% dengan tingkat anggarannya 330.000.000 dari peningkatan tingkat realisasi dari setiap tahunnya menunjukkan bahwa tingkat realisasinya stabil, karena setiap tahunnya terjadi peningkatan realisasi biaya operasional perjalanan dinas.

b. Pemeliharaan Gedung

Pemeliharaan dinas tingkat realisasi anggaran untuk kegiatan ini mengalami penurunan pada tahun 2018 tingkat realisasinya mencapai 98,00% dengan tingkat anggaran 5.000.000, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan anggaran, karena anggaran yang diberikan sesuai dengan realisasinya. Pada tahun 2019 tingkat realisasinya mencapai 100% dengan jumlah anggaran 9.000.000 sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasinya mencapai 100,00% dengan anggaran 10.000.000.

c. Pemeliharaan Kendaraan

Pemeliharaan Kendaraan, tingkat realisasi anggaran ini tidak stabil karena adanya penurunan maupun peningkatan tingkat realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran yang diinginkan akibat realisasi mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tingkat realisasinya 87,18% dengan anggaran 14.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi naik sebesar 96,00% dengan anggaran sebesar 15.000.000 dan untuk tahun 2020 realisasi anggaran turun menjadi 93,44% dengan anggaran sebesar 18.300.000 sebab terjadinya penurunan anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan realisasinya maka dari itu belanja pemeliharaan kendaraan mengalami penurunan.

d. Penyusutan Gedung

Penyusutan gedung, tingkat realisasi untuk kegiatan ini tidak stabil karena adanya penurunan maupun peningkatan tingkat realisasi yang tidak sesuai dengan anggaran yang diinginkan akibat realisasi mengalami penurunan. Pada tahun 2018 tingkat realisasi 91,42% dengan anggaran 70.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi naik sebesar 94,44% dengan anggaran 72.000.000 dan untuk tahun 2020 tingkat realisasi anggaran nya turun dengan realisasi anggaran sebesar 93,5% dengan anggaran 50.000.000

e. Penyusutan Kendaraan

Penyusutan kendaraan, tingkat realisasi untuk kegiatan ini tidak stabil karena adanya penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018 tingkat realisasinya mencapai 91,31% dengan jumlah anggaran sebesar 40.500.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 95,47% dengan jumlah anggaran sebesar 42.000.000 sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasinya mencapai 88,33% dengan jumlah anggaran sebesar 60.000.000

f. Penyusutan Investasi

Penyusutan investasi, tingkat realisasi untuk kegiatan ini stabil karena tidak adanya penurunan. Pada tahun 2018 tingkat realisasi mencapai 72,00% dengan anggaran sebesar 12.500.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 88,24% dengan anggaran sebesar 15.000.000 sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasi mencapai 96,5% dengan jumlah anggaran sebesar 20.000.000.

g. Alat-Alat Kantor

Alat-Alat kantor, tingkat realisasi untuk kegiatan ini stabil karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tingkat realisasi menjadi 94,70 dengan anggaran realisasi sebesar 21.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 98,40% dengan anggaran sebesar 24.500.000 sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasi mencapai 99,28% dengan anggaran sebesar 28.000.000.

h. Rekening Listrik

Rekening listrik, tingkat realisasi untuk kegiatan ini stabil karena setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 tingkat realisasi mencapai 95,60% dengan anggaran sebesar 16.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 96,27% dengan anggaran sebesar 16.100.000 sedangkan pada tahun 2020 anggaran realisasi sebesar 97,57% dengan anggaran sebesar 16.500.000.

i. Rekening Telephone

Rekening telephone, tingkat realisasi untuk kegiatan ini stabil karena setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 tingkat realisasi mencapai 94,00% dengan anggaran

sebesar 5.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi mencapai 97,93% dengan tingkat realisasi sebesar 6.000.000 sedangkan tahun 2020 tingkat realisasi mencapai 98,75 dengan anggaran sebesar 8.000.000.

j. Rekening Air

Rekening air, tingkat realisasi untuk kegiatan ini tidak stabil karena adanya penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018 tingkat realisasi mencapai 93,75% dengan anggaran sebesar 98.000.000 pada tahun 2019 tingkat realisasi 96,66% dengan anggaran 9.000.000 sedangkan pada tahun 2020 tingkat realisasi mencapai 93,68% dengan anggaran 9.500.000.

k. Keamanan & Kebersihan

Keamanan & kebersihan, tingkat realisasi untuk kegiatan ini stabil karena setiap tahun anggaran realisasi mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 anggaran realisasi mencapai 8% dengan anggaran 5.000.000 pada tahun 2019 anggaran realisasi mencapai 75,71% dengan anggaran 7.000.000 sedangkan pada tahun 2020 anggaran realisasi mencapai 77,5% dengan anggaran sebesar 8.000.000.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan :

1. Pada tahun 2018 dengan jumlah total anggaran biaya operasional sebesar Rp.417.000.000 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.368.400.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 48.600.000. pada tahun 2019 dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 515.600.000 dengan tingkat realisasi Rp.489.223.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.26.377.000. sementara pada tahun 2020 dengan jumlah total anggaran biaya operasional sebesar Rp.588.300.000 dengan tingkat realisasinya sebesar Rp.562.100.000 dengan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp.26.200.000. jumlah anggaran biaya operasional setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tingkat realisasi anggaran setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tahun 2020 merupakan tingkat realisasi tertinggi dari tahun 2018 dan 2019, dan keterangan biaya operasional setiap tahunnya tidak mengalami perubahan hanya alokasi yang berubah disetiap biaya-biaya operasional yang dikeluarkan.
2. Hasil analisis anggaran biaya operasional tahun 2018-2020 perjalanan dinas stabil karena tidak adanya penurunan tingkat realisasi. Pemeliharaan gedung tidak stabil karena adanya penurunan maupun peningkatan tingkat realisasi dikarenakan kenaikan harga barang yang digunakan untuk pemeliharaan gedung setiap tahunnya terus meningkat sebab itulah realisasi yang diinginkan tidak sesuai dengan anggarannya, maka dari itu tingkat realisasi menjadi tidak stabil. Pemeliharaan kendaraan tidak stabil karena adanya penurunan maupun peningkatan. Penyusutan gedung tidak stabil karena adanya penurunan maupun peningkatan tingkat realisasi. Penyusutan kendaraan tidak stabil karena adanya penurunan maupun peningkatan tingkat realisasi. Penyusutan investasi stabil karena tidak adanya penurunan tingkat realisasi. Alat-alat kantor, rekening listrik, rekening telephone stabil karena tidak adanya penurunan tingkat realisasi. Rekening air tidak stabil dikarenakan adanya penurunan maupun peningkatan realisasi. Kebersihan & keamanan stabil dikarenakan tidak adanya penurunan tingkat realisasi.

Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan kepada pihak akademik yaitu:

- a. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada PUPR mengingat pentingnya anggaran biaya operasional, maka sebaiknya anggaran disusun secara teliti sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja.
- b. PUPR sumbar perlu meningkatkan efisiensi penggunaan biaya operasional setidaknya

mempertahankan kondisi saat ini dan melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya pemborosan dan serta memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktifitas kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyari. 2013. *Anggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE.
- Akbar, I. 2016. *Analisis Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang. Jurnal Akuntansi*. 1-10.
- Br. Sinaga, Judika Shella. 2016. “Analisis Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Ukur Kinerja Pada PT. Karya Murni Perkasa Medan”.
- Bustami, Bastian dan Nurlela. 2012. “Akuntansi Biaya Edisi 3”. Edisi ketiga. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Candraningrum, Septiyanti. 2018. “Analisis Varians Anggaran untuk Pengendalian Manajemen di Perusahaan Properti PT. Duta Restra Asri Mandiri. Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang.
- Cindy dan Mardoni Efrianto dan Sari Septiana. 2014. “Analisis Varian Anggaran Biaya Operasional PT Netama Gapura Mas Pada Proyek Pembangunan Ruko Pundi Mas”. Laporan Tugas Akhir Akuntansi. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Politeknik Palcomtech, Palembang.
- Dunia, Firdaus Ahmad, Wasilah Abdullah dan Catur Sasongko. 2019. “Akuntansi Biaya Edisi 5”. Jakarta: Salemba Empat.
- Firdaus, Muhammad kemal. 2017. “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Budget Emphasis Terhadap Senjangan anggaran (Studi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)”. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Herlianto, Didit. 2015. “Anggaran Keuangan”. Cetakan pertama. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Irman et al.(2020). “Analisa Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Meningkatkan Laba Pada PT. Kimia Farma Trading And Distribution Pekanbaru”
- Julita. 2016. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketujuh. Bandung: CPM.
- Maryam, S. 2020. *Analisis Pengendalian Biaya Operasional Pada Pt Midi Utama Indonesia Tbk. Economy Deposit Journal*, 2(1), 43–48.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurfaidah. 2017. *Analisis Efisiensi Biaya Operasional Pengelolaan Taman Wisata Tanjung Bira Terhadap Pendapatan Dinas Parawisata Daerah Kabupaten Bulukumba. Jurnal Administrasi Bisnis*, 159–172
- Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- Rizki & Chartady. (2018). “Analisis Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Tanjung Untung Tanjungpinang” *Accounting Scientific Journal*, 1(1).
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta. Erlangga.
- Suak et al.(2021). “Peranan Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Manajerial Pada PT. Dirgaputra Ekapratama” *Jurnal EMBA*, 9(2), 876–882.
- Suak, L. A., Ponto, W., & Pinatik, S. 2021. *Peranan Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alat Pengendalian Kinerja Manajerial Pada PT. Dirgaputra Ekapratama. Jurnal EMBA*, 9(2), 876–882.
- Sugiyono, 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : PT alfabeta
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur urusan Otonomi Daerah.